

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA INDU MAKOMBONG KECAMATAN MATAKALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Epi Puspita D¹

¹Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: disahaifa@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the extent to which development in the village of Indu Makombong has been carried out in accordance with the established village program. The results of the author's research that the implementation of development in Indu Makombong Village, Matakali District, Polewali Mandar Regency has not been in accordance with what is expected by the community, development is also still very less visible from several programs and developments that have not been realized.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pembangunan di desa Indu Makombong telah dilakukan sesuai dengan program desa yang telah ditetapkan. Hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, pembangunan juga masih sangat kurang terlihat dari beberapa program dan pembangunan yang belum terealisasi.

Kata Kunci; *Pembangunan, Program Desa, Indu Makombong.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut NKRI.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan

daya guna. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Proses pembangunan suatu negara bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P. Siagian, 2008: 96).

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005: 3).

Pendapat lain menjelaskan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicitacitakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 12).

Harun dan Ardianto (2011: 90-97), setidaknya ada 5 teori dalam melihat pembangunan antara lain:

- a. Teori Modernisasi; tidak hanya perubahan di dalam satu lapisan sosial mampu merangsang perubahan di pihak lain, tetapi modernisasi sosial bisa menghasilkan lanjutan perubahan, dan juga untuk menyerap perubahan tekanan dan menyesuaikan dirinya sendiri untuk mengubah

- permintaan. Dengan kata lain, proses tampak secara relatif tidak dapat diubah. Sekali ketika kondisi-kondisi yang perlu dibentuk untuk memulai, suatu negeri mulai beradaptasi, lalu menjadi modern, dan tinggal bertahan modern (Schramm, dalam Melkote, 1991:38).
- b. Teori Sosiologi Pembangunan; pada garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut: *pertama*, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitive menuju masyarakat maju; *kedua*, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindari.
 - c. Tradisi versus Modernisasi; ini sangat utama berketub dua dimana langkah-langkah universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal di kurangi menjadi tipe ideal titik-akhir.
 - d. Teori Fungsionalisme; bagi Talcott Parsons masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia.
 - e. Teori Evolusioner Universal; ini adalah kontribusi Parson yang lain, kategori sosial umum. Ia mengidentifikasi dan menguraikan corak struktural menyangkut sistem di barat yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungan mereka sedang dalam proses pengembangan bermasyarakat: organisasi birokrasi, uang, pasar, asosiasi demokratis, dan suatu system tentang undang-undang umum. Universal ini ditentukan penting bagi masyarakat modernisasi yang belum berkembang (Melkote, 1991:42)

Menurut Deddy T. Tikson (2005: 33) bahwa pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Dengan demikian, bila hendak disimpulkan makna pembangunan dari para ahli di atas, dapat diuraikan bahwa substansi dari pembanguna adalah upaya sadar dan terencana untuk mencapai titik kemajuan tertentu sesuai yang dikehendaki.

Adapun tujuan dasar dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera , Disamping itu pembangunan desa mempunyai tujuan yang sifatnya lebih strategis dan dapat lebih mempercepat proses pembangunan desa antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Khairuddin H (1992) Yaitu:

- a. Mempercepat sarana hubungan dan komunikasi untuk lebih membuka Desa terhadap daerah sekitarnya sehingga tidak menjadi Daerah yang terisolasi
- b. Meningkatkan dan menyempurnakan struktur administrasi pemerintah Desa beserta personilnya sebagai usaha menciptakan pembangunan desa yang lebih terarah dan Efisien.

Tujuan jangka pendek pembangunan desa menekankan pada peningkatan taraf hidup masyarakat terutama melalui pembangunan, khususnya bidang ekonomi. Bukan berarti bidang-bidang lain diabaikan, tetapi pembangunan Desa juga menginginkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual. Pembangunan mental menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya tekanan mental bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) tipe deskriptif. Studi kasus merupakan suatu metode dalam penelitian yang penelaannya terhadap suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan konferensif. Studi kasus bertujuan mengembangkan dan mengeneralisasikan teori bukan menghitung frekuensi (Sanapiah, 2003). Studi kasus tipe deskriptif dapat melacak urutan peristiwa hubungan antar pribadi, menggambarkan sub-budaya, dan menemukan fenomena kunci. Fokus studi kasus selain individu adalah kelompok. Lembaga, organisasi, masyarakat atau komunitas.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran, tentang kondisi atau pun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 2-5).

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian dengan logika berpikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya (deskriptif). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam rangka pelaksanaan analisis pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara dari 14 responden memperlihatkan pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan warganya. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan misalnya pembangunan jalan di desa tersebut masih sangat kurang, beberapa pembangunan fisik yang belum selesai dan belum terealisasi, pemabagian bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu menurut mereka belum merata dan belum mencukupi warganya, serta masih banyak lagi keluhan masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai evaluasi dalam masa pemerintahan berikutnya.

Informan berpersepsi bahwa pembangunan desa masih banyak yang harus dibenahi mulai dari jalan, belum meratanya bantuan untuk warga yang membutuhkan, serta program kerja desa dalam setahun ini masih ada beberapa belum terealisasi dan juga ada beberapa sampai saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Dari beberapa persepsi yang disampaikan beberapa informan di atas, jelas dikatakan bahwa ada beberapa point yang menjadi faktor beberapa penyebab pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik yakni:

1. Faktor Internal meliputi:

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi serta keterampilan tinggi. Sehingga benar-benar mampu menjadi inovator dan mampu memegang tanggung jawabnya sebaik mungkin. Sebagaimana yang disampaikan informan III bahwa;

“Sangat dibutuhkan orang yang betul-betul mampu dan memiliki SDM yang baik untuk menjadi inovator pembangunan dalam suatu pelaksanaan pembangunan. Pembangunan di desa sudah sangat bagus, sudah sangat memuaskan program yang sudah dibuat dan dilaksanakan, walaupun belum semuanya selesai, masih dalam proses.” (*Wawancara*, 4 Desember 2018)

b. Komunikasi

Komunikasi suatu hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Keterampilan komunikasi akan menjamin berjalannya suatu perencanaan dan fungsi pemerintahan. Komunikasi yang baik dapat berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik.

Pembangunan juga tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas pemerintahan yang harus ditingkatkan dalam pembangunan tetapi juga kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana pemerintahan yang baik ialah hubungan yang saling membantu dan membangun di antara negara, swasta dan masyarakat.

Pemerintahan memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia pembangunan, usaha dan masyarakat. Swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan dalam pembangunan.

Terkait dengan persoalan komunikasi, Sutrisna yang berprofesi sebagai pembuat batu merah menjelaskan bahwa:

”Saya juga tidak melihat ada kegiatan masyarakat sebagai tempat menyampaikan langsung keluhan masyarakat, dan agar silaturahmi terjalin dengan baik.” (*Wawancara*, 3 Januari 2019)

Pada tempat berbeda, Dadang dari lingkungan Cappelgo yang berprofesi sebagai pembuat batumerah juga beresepsi bahwa:

“Kalau bagi saya pembangunan di desa ini belum berjalan dengan baik, entahlah faktor apa. Pemerintah seharusnya lebih memperjelas lagi kepada kami masyarakat dan melakukan komunikasi serta memberi informasi yang jelas apa kendala dalam proses pembanguann ini. Setidaknya masyarakat tahu dan tidak simpang siur ceritanya. kalau sudah dijelaskan sudah enak hati kita jadi masyarakat mengetahuinya.” (*Wawancara*, 5 Desember 2018)

Hal ini membuat keputusan atau arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan juga tidak terpahami oleh masyarakat sebab komunikasi yang buruk. Akhirnya arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan yang tidak dipahami secara baik oleh masyarakat menghasilkan persepsi yang beragam bahkan bisa sampai negatif.

c. Sumber Daya Alam

SDA adalah hal yang harus terpenuhi karena menentukan baik buruknya sebuah penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan 14 bahwa;

“Pemerintah tidak pro aktif dalam upaya pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat yang seharusnya ada kegiatan mencari tau informasi yang jelas dilakukan, mengingat luas wilayah desa ini sangat luas, agar dapat membagi rata bantuan dan melihatarganya yang betul betul membutuhkan”

Dan juga informan 5 beresepsi bahwa:

“Tidak puas pelaksanaan pembanguaan pemerintahnya karena masih sngat kuran pembanguan yang terjadi dan tidak merata nya pembagian bedah rumah”

Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah desa, bahwa informasi juga penting dan sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembanguann oleh pemerintah.

d. Kewenangan

Kewenangan adalah sebuah hak untuk membuat keputusan guna melaksanakan tanggung jawab sehingga kewenangan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dalm pembanguan berdasarkan pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku pada setiap legitimasi.

Karena desa sendiri diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sebagaimana tugas dan fungsinya.

Namun hasil penelitian yang dilakukan masyarakat setempat justru mempertanyakan kewenangan desa dalam menjalankantugas dan fungsinya sebagaimana yang disampaikan informan 9 bahwa:

“Pemerintah desa kurang memberikan perhatian bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian”

2. Faktor Eksternal meliputi;

a. Sumber daya modal (Dana)

Kemampuan keuangan sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan juga dapat menjadi salah satu point penting dalam menghambat terealisasinya peembangunan yang telah direncanakan, karena tanpa pembiayaan pembangunan tidak akan dapat berjalan seperti yang dikatakan oleh informan 10 bahwa:

“Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan ialah belum cairnya dana desa sebanyak 40% dan inilah yang menjadi penghambat adanya program yang belum terealisasi”

Dan ditempat lain hal yang sama diungkapkan oleh informan 9 bahwa:

“Adapun program yang belum berjalan seperti pembangunan jalan sepotong sepotong, dikarenakan karena faktor biaya yang belum mencukupi untuk merenovasi dan melakukan pembangunan tersebut”

b. Sikap dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan tentang pembangunan.

Sikap masyarakat dalam pembangunan juga sangat berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan, karena untuk menjalankan suatu pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mampu menjadi motivasi dan ikut berpartisipasi bersama dalam pembangunan desa.

c. Faktor keamanan

Faktor keamanan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena untuk meninjau dan mengevaluasi kembali seberapa berjalannya suatu kebijakan pembangunan tanpa keamanan pun pembangunan tidak akan berlangsung dengan baik.

Adapun faktor yang lain yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah:

1. Adanya program yang akan dilaksanakan
2. Adanya Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksana maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses perencanaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui dilapangan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi kembali dalam pembangunan selanjtnya agar semua perencanaan pembangunan berjalan sesuai program desa dan harapan masyarakat.

Faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya pelaksanaan pembangunan Indu Makombong adalah, faktor internal terdiri dari; kurang sumber daya manusia dan sumber daya alam, kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak ditemukannya wadah atau tempat masyarakat untuk lebih berkomunikasi dengan pemerintah. Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembangunan adalah kurangnya sumber

daya finansial (dana) dan faktor keamanan serta sikap dan pemahaman masyarakat dalam pembangunan.

SARAN

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di Desa Indu Makombong agar lebih meningkatkan pembangunan desanya sesuai dengan fungsi kepala desa dalam pembangunan, bukan hanya sekarang tetapi juga di masa datang, agar Desa Indu Makombong dapat bersaing dengan desa lain dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong agar lebih berpacu pada kebutuhan masyarakatnya dan melihat betul masyarakat yang benar benar membutuhkan perubahan dan pembangunan, agar menghasilkan kerjasama yang baik untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu menyelesaikan pembangunan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama, BPFE Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong, Suyanto dan Sutirahh. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafik
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gie The Liang 2000. *Administrasi perkantoran*. Jakarta: Modern Liberty
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Hanif Nurcholish, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta : Erlangga.

- Ibrahim, johnny. 2006. *Teory & Metedeologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing
- Khairuddin, H.1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta PT Gelora Aksara
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Pengelolaan Pasar Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007
- Melkote , S.R & Steeves, H.L. 2001. *Commu-nication for Development in the Third World; Theory and practice for Develop-ment*. New Delhi. Sage Publication
- Meleong, J, Lexy. 2006. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang, P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia(Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Sondang P. Siagian, 1994, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. CV.Haji Mas
- Siregar, Sofyan. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Tjokromidjojo, Bintoro.1990.*Econoic Development*. Jakarta: Haji Masagung
- Tjutju Yuniarsih dan Suwanto. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta.
- Vurtiana, Melita. 2012. *Metedeologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Alexander, M. 1994. *Biodegradation and Bioremediation*. Academic Press, New York.
- Alejandro, Portes. 1976. “On the Sociology of National Development: Theories and Issues”. *American Journal of Sociology*